



**2024**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **AUDIT LINGKUNGAN DAN SOSIAL**

### **(7 SUB PROJECT CSRRP )**

## KATA PENGANTAR



Rangkaian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 telah berdampak pada aktivitas masyarakat dengan rusaknya hunian dan infrastruktur penunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan total kerusakan mencapai lebih dari 18 Triliun rupiah. Sektor permukiman dan infrastruktur dasar yang mencakup jalan dan jembatan, sistem pengairan, air minum, air limbah, jaringan listrik dan komunikasi, serta fasilitas umum merupakan yang paling terdampak.

Pembangunan kembali dengan lebih baik, aman, dan berkelanjutan menjadi visi pemulihan kehidupan di Kabupaten/Kota terdampak. Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah atau *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) hadir untuk mendukung visi tersebut melalui (i) penyediaan huntap dan infrastruktur permukiman; (ii) rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum; dan (iii) dukungan pelaksanaan kegiatan. Dalam implementasinya, CSRRP mengedepankan prinsip bangunan tahan gempa, desain universal, mitigasi risiko kekerasan berbasis gender, manajemen sampah dan puing bangunan, serta penerapan bangunan gedung hijau. CSRRP sebagai bagian dari program Indonesia *Disaster Resilience and Reconstruction* (IDRAR) juga menargetkan peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah terdampak bencana, memiliki risiko tinggi, dan merupakan kawasan pusat pengembangan ekonomi.

Laporan Audit Lingkungan dan Sosial CSRRP ini merupakan salah satu laporan dari enam laporan kegiatan evaluasi dan studi yang dilaksanakan oleh ESC CSRRP pada 2024. Laporan ini memuat gambaran mengenai implementasi ESMF - CSRRP dan SEP, dengan bagian yang terpisah mengenai audit lingkungan dan sosial pada kegiatan sub proyek terpilih dengan temuan dan rekomendasi yang spesifik untuk tiap lokasi proyek termasuk ringkasan sintesis mengenai kesenjangan, kelebihan, dan kelemahan dari baik proyek secara keseluruhan maupun manajemen risiko lingkungan dan sosial di lokasi. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memetik pelajaran dari hasil studi ini sehingga dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi pascabencana lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2024

Ketua *Central Project Management Unit*  
CPMU – CSRRP



**Arie Setiadi Moerwanto**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Maksud, Tujuan dan Keluaran .....	8
1.3. Ruang Lingkup.....	9
<b>BAB 2 METODOLOGI.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB 3 KERANGKA HUKUM DAN INSTITUSI .....</b>	<b>12</b>
3.1. Kerangka Hukum .....	12
3.2. Kerangka Institusi/ Struktur Organisasi CSRRP .....	14
<b>BAB 4 HASIL AUDIT DAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN .....</b>	<b>15</b>
4.1. Ruang Lingkup 3 - Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	15
4.2. Ruang Lingkup 4 - Hasil Audit Management Lingkungan dan Sosial.....	18
4.3. Ruang Lingkup 5 dan 6 - Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana, Konsultan dan Kontraktor.....	21
4.4. Ruang Lingkup 7 - Menilai Pengelolaan Risiko Terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.....	22
4.5. Ruang Lingkup 8 - Pengadaan Lahan dan Relokasi .....	27
4.6. Ruang Lingkup 9 - Menilai Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Obyek Audit.....	10
Tabel 2.	Daftar Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang Perlu Disusun berdasarkan ESMF CSRRP dan Aturan Indonesia untuk Setiap Tahap Kegiatan .....	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Lingkungan dan Sosial.....	9
Gambar 2.	Kerangka Kerja Audit Lingkungan dan Sosial.....	11
Gambar 3.	Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Sosial CSRRP.....	12
Gambar 4.	Alur Pengelolaan dan Sosial CSRRP .....	13

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BP2JK	: Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi
BP2P	: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPW	: Balai Prasarana Permukiman Wilayah
CESMP	: <i>Contractor Environmental and Social Management Plan</i>
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
CPMU	: <i>Central Project Management Unit</i>
CSRRP	: <i>Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project</i>
DDR	: <i>Due Diligent Report</i>
DED	: Detailed Engineering Design
DELH	: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
DJCK	: Direktorat Jenderal Cipta Karya
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPKP	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DPRP	: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
DRM/PRB	: <i>Disaster-Risk Management / Penanganan Risiko Bencana</i>
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
ESA	: <i>Environmental and Social Audit</i>
ESC	: <i>Evaluation and Study Consultant</i>
ESCP	: <i>Environmental and Social Commitment Plan</i>
ESCAP	: <i>Environmental and Social Codes of Practices</i>
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i>
ESMP	: <i>Environmental and Social Management Plan</i>
ESS	: <i>Environmental and Social Standard</i>
FGRM	: <i>Feedback and Grievance Reddres Mechanism</i>
GBV	: <i>Gender Based Violence</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
Hunatap	: Hunian Tetap

Huntara	: Hunian Sementara
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KPI	: <i>Key Performance Indicators</i>
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak
NMC	: <i>National Management Consultant</i>
NSUP-CERC	: <i>National Slum Upgrading Project-Contingency Emergency Responses Component</i>
LAIR	: <i>Land Acquisition Implementation Report</i>
LAP	: <i>Land Acquisition Plan</i>
LARAP	: <i>Land Acquisition and Relocation Action Plan</i>
LMP	: <i>Labor Management Procedure/ Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i>
NOL WB	: <i>No Objection Letter World Bank</i>
NSUP	: <i>Nasional Slum Upgrading Project</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSP	: <i>Oversight Service Provider</i>
PAD	: <i>Project Appraisal Document</i>
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDO	: <i>Projects Development Objective</i>
PIU	: Project Implementation Unit
PJU	: Penerangan Jalan Umum
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
PMC	: <i>Project Management Consultant</i>
PMU CK	: <i>Project Management Unit Cipta Karya</i>
PMU PP	: <i>Project Management Unit Penyediaan Perumahan</i>
POKJA	: Kelompok Kerja
POM	: <i>Project Operational Manual</i>
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RAP	: Rencana Aksi Pemindahan / <i>Relocation Action Plan</i>
RKK	: Rencana Keselamatan Konstruksi
RKL-RPL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan
RK3LS	: Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Sosial
RKPPL	: Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

RMLLP	: Rencana Kerja Managemen Lalu Lintas Pekerjaan
RMPK	: Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi
RPP	: Rencana Penataan Permukiman
RT	: Rukun Tetangga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTP	: Ruang Terbuka Publik
RTRW	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RW	: Rukun Warga
SEA/SH	: <i>Sexual Exploitation and Abuse/ Sexual Harrashment</i>
SEP	: <i>Stakeholder Engagement Plan</i>
SETDA	: Sekretariat Daerah
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SITABA	: Sistem Informasi Tanggap Bencana
SK	: Surat Ketetapan/Keputusan
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TFL	: Tim Fasilitator Lapangan
TMC	: <i>Technical Management Consultant</i>
VAC	: <i>Violence Against Children</i>
WB	: <i>World Bank</i>
WTB	: Warga Terkena Dampak Bencana
WTP	: Warga Terkena Dampak Proyek



## BAB 1

# PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) mendukung program pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah dan membantu merehabilitasi, merekonstruksi, dan meningkatkan ketahanan bangunan yang kritis. Pada prinsipnya, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah CSRRP sejalan dengan Rencana Induk Pemulihan Pemerintah.

CSRRP telah membentuk Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) yang sejalan dengan *Environmental and Social Standard* (ESS) yang berlaku dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. ESMF juga mencakup ketentuan yang tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang dan peraturan Pemerintah untuk memenuhi ESS. Sesuai Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial/ *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP), audit lingkungan dan sosial independen/ *Environmental and Social Audit* (ESA) dari sub proyek yang dibiayai oleh CSRRP diperlukan untuk memastikan persyaratan ESMF diterapkan secara memadai dan konsisten dengan ESS.

Aspek utama yang memerlukan penilaian audit independen meliputi pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang merugikan, seperti penanganan limbah berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat (termasuk pengelolaan risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual/ *Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harrasment* (SEA/SH), masuknya tenaga kerja, pengadaan tanah, relokasi masyarakat yang terdampak bencana dan keseluruhan proses konsultasi, termasuk keterlibatan dengan penduduk pribumi dan/atau masyarakat adat jika ada di lokasi sub proyek.

### 1.2. Maksud, Tujuan dan Keluaran

**Maksud** dari kegiatan Audit Lingkungan dan Sosial adalah untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan dan sosial yang ada, khususnya dalam hal pemenuhan ESMF (termasuk di dalamnya adalah Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder Engagemet Plan* (SEP) dan ESCP.

**Tujuan** dari kegiatan Audit Lingkungan dan Sosial ini secara umum adalah melakukan penilaian independen terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ESMF.

Tujuan kegiatan Audit Lingkungan dan Sosial ini akan dicapai melalui beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

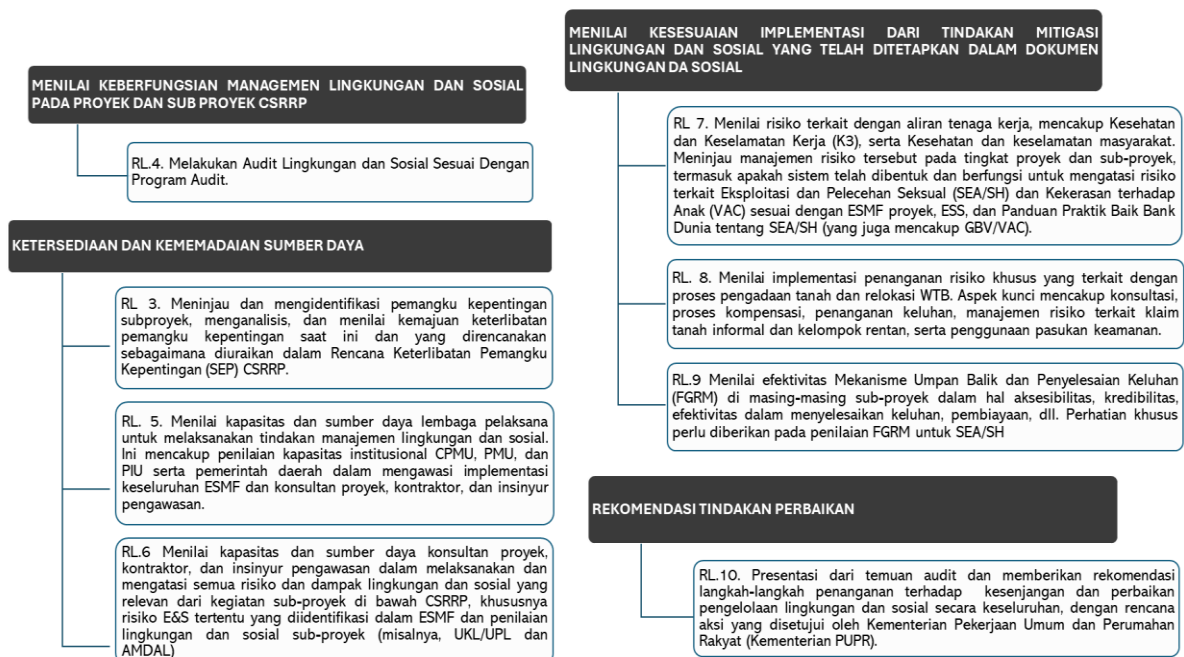
1. Menilai keberfungsian aspek manajemen risiko lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek dan sub proyek CSRRP, serta ketersediaan dan kememadai sumber daya (Ruang Lingkup 3, 5 dan 6).

2. Menilai kesesuaian implementasi tindakan mitigasi dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMPs) dan/atau Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL, atau SPPL), Rencana Akuisisi Tanah (LAPs) dan/atau Kajian Kelayakan Tanah (DD reports) dan Rencana Aksi Pemindahan (RAPs) sebagaimana diuraikan dalam ESMF-CSRRP. (Ruang Lingkup 4, 7, 8 dan 9).
3. Memberikan rekomendasi tindakan untuk mengisi kesenjangan yang ada untuk implementasi proyek saat ini dan masa depan. (Tujuan 10).

### 1.3. Ruang Lingkup

Tim ESC menilai 7 (tujuh) aktivitas sub proyek di beberapa lokasi di bawah komponen 1 dan 2 yang mewakili paket infrastruktur dan perumahan permanen (hunian tetap), yang mencakup dua risiko substansial, empat risiko sedang/moderat, dan satu aktivitas dengan risiko rendah berdasarkan hasil penyaringan risiko lingkungan dan sosial proyek. Identifikasi aktivitas sub proyek telah disepakati dengan PMU dan Bank Dunia sebelum memulai ESA.

Berikut ini gambaran kaitan antara tujuan dan ruang lingkup kegiatan Audit Lingkungan dan sosial.



**Gambar 1. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Lingkungan dan Sosial**

### Objek Audit

Kriteria seleksi untuk aktivitas sub proyek meliputi:

1. Sub proyek yang melibatkan proses pengadaan lahan (LAP/DD) dan/atau relokasi warga terdampak bencana (RAP);
2. Sub proyek yang memerlukan izin atau persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL/UKL-UPL atau ESMP, atau SPPL-ESCAP; Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP atau Rencana K3LS Kontraktor) selama fase konstruksi;

3. Perwakilan dari komponen 1 (Huntap dan infrastruktur pendukung) dan 2 (Fasilitas Publik).

**Tabel 1. Obyek Audit**

TINGKAT RISIKO*	SUB PROYEK TERPILIH
Substansial	<i>Rehabilitation and Reconstruction of Education Facilities in Universitas Tadulako Phase II (RR Universitas Tadulako)</i>
Substansial	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-C (Huntap Kawasan Talise Fase II)</i>
Sedang/ Moderat	<i>Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, Kota Palu (IPA Poboya)</i>
Sedang/ Moderat	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-B (Huntap Satelit Bangga Dusun 2)</i>
Sedang/ Moderat	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-A (Huntap Satelit Tompe 1,2,3)</i>
Sedang/ Moderat	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-A (Huntap Satelit Wani 1)</i>
Rendah	Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio

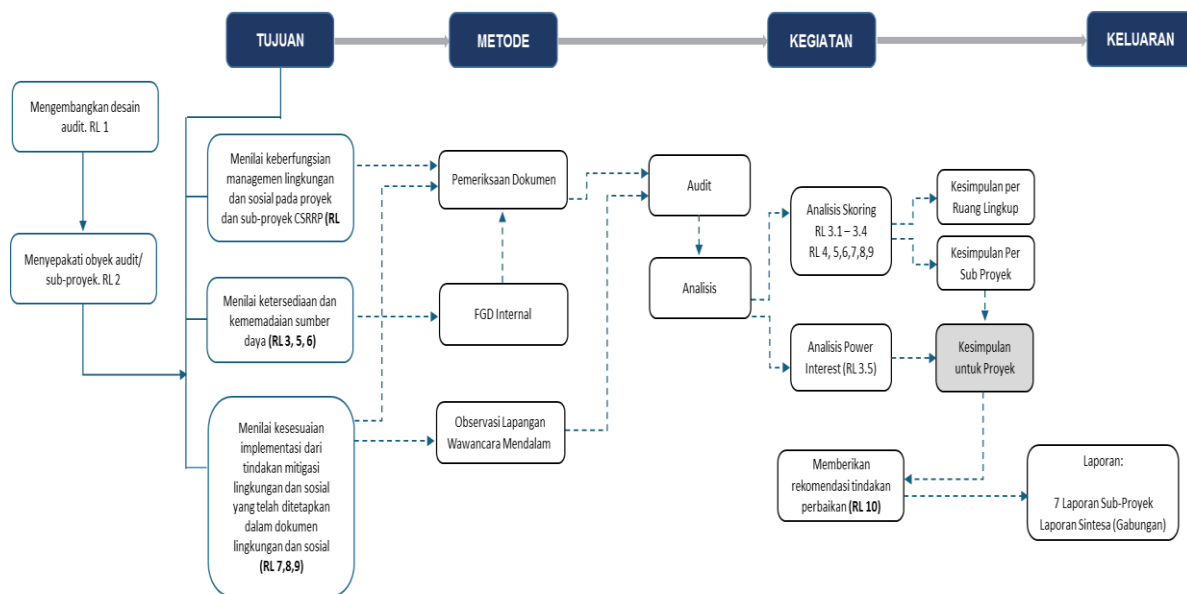
\* Tingkat Risiko berdasarkan Hasil Screening yang dilakukan oleh PMU

## BAB 2 METODOLOGI

Kegiatan ESA dilaksanakan dengan menilai pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan dan sosial, pemeriksaan dokumen rencana, implementasi dan dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial. Audit juga dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pelaksana proyek, observasi implemetasi, identifikasi stakeholder dan menilai keterlibatan, pengaruh dan kepentingannya.

### Kerangka Kerja Audit

Berikut ini adalah kerangka kerja yang dipakai dalam kegiatan ESA.



**Gambar 2. Kerangka Kerja Audit Lingkungan dan Sosial**

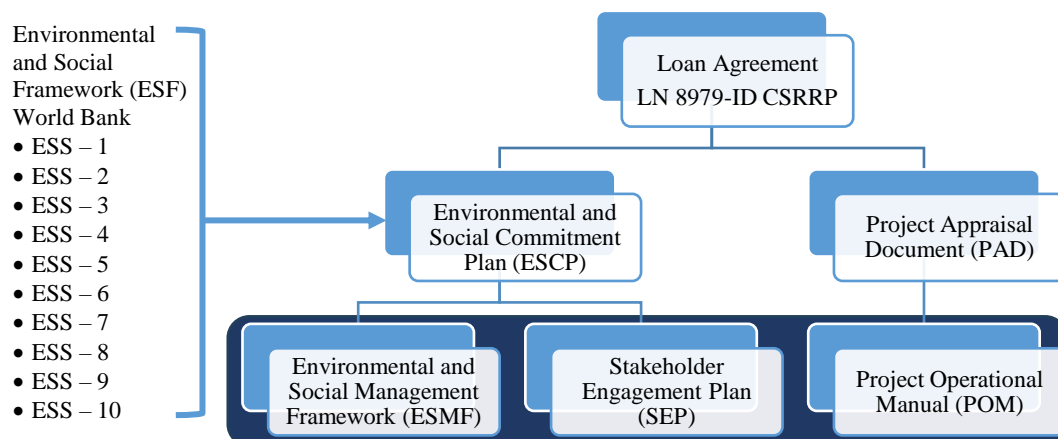
## BAB 3

### KERANGKA HUKUM DAN INSTITUSI

#### 3.1. Kerangka Hukum

Dalam Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, termuat rencana komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang termuat dalam dokumen *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP). ESCP disusun mengacu pada *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia. Untuk memastikan terpenuhinya ESCP, maka disusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ *Environmental and Social Management Framework CSRRP* yang mengacu pada Standar Lingkungan dan Sosial/ *Environmental and Social Standards* (ESSs). ESMF dilengkapi dengan *Stakeholder Engagement Plan* (SEP) yang berisi identifikasi, rencana strategi serta analisis pelibatan pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa semua stakeholder dapat dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

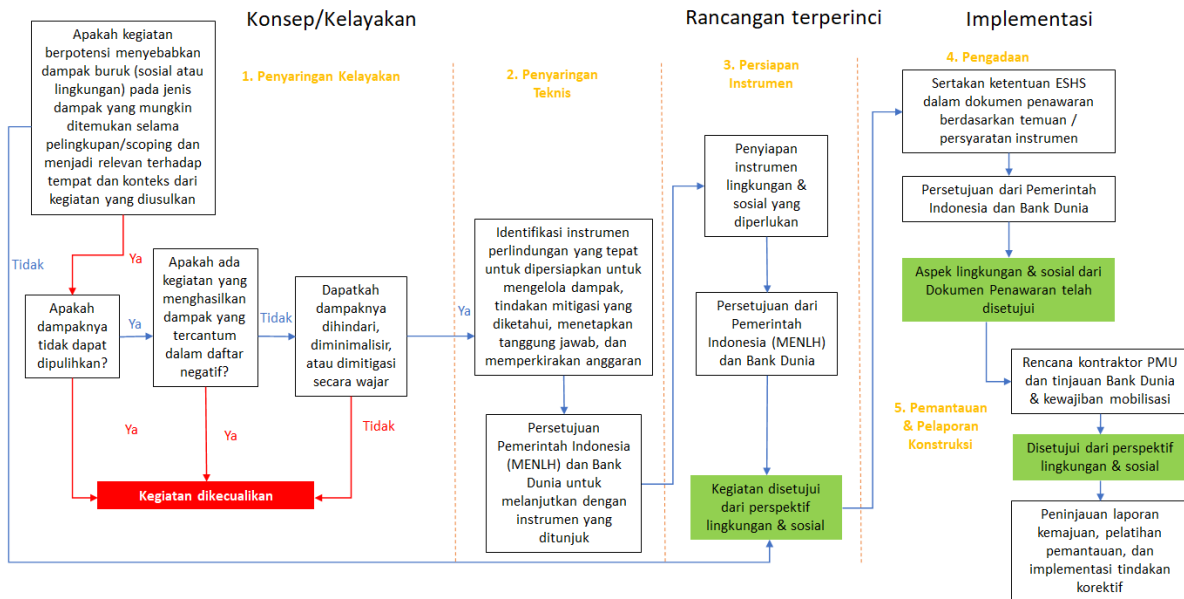
Berikut ini adalah gambaran kerangka hukum pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP (Dokumen Tingkat Proyek).



**Gambar 3. Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Sosial CSRRP  
(Dokumen Tingkat Proyek)**

#### 3.2 Alur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Gambar berikut memperlihatkan alur pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP (Sumber: POM CSRRP).



**Gambar 4. Alur Pengelolaan dan Sosial CSRRP**

Di dalam dokumen ESMF CSRRP, terdapat persyaratan untuk menyusun dokumen lingkungan dan sosial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan CSRRP telah sesuai dengan persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan standar Bank Dunia. Di sisi lain, Indonesia juga telah memiliki aturan mengenai pengelolaan lingkungan dan sosial serta dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang perlu disusun. Berikut ini adalah daftar dokumen-dokumen lingkungan dan sosial yang perlu disusun dalam kegiatan CSRRP berdasarkan persyaratan ESMF dan aturan Indonesia dalam setiap tahapan kegiatan.

**Tabel 2. Daftar Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang Perlu Disusun berdasarkan ESMF CSRRP dan Aturan Indonesia untuk Setiap Tahap Kegiatan**

Tahapan Kegiatan	Level Dokumen	Dokumen Yang Harus Disusun Berdasarkan ESMF	Dokumen Yang Harus Disusun Berdasarkan Aturan Indonesia
Penyiapan Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan Sub Proyek	Proyek	Dokumen Informasi dan Kelayakan Proyek	-
Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen	Proyek	Penilaian Risiko Kegiatan untuk tiap paket/ sub proyek/ kegiatan	-
	Sub Proyek	-	Dokumen Penapisan Lingkungan
Penyiapan Instrumen	Sub Proyek	<i>Environmental and Social Management Plan (ESMP)</i>	AMDAL/ UKL-UPL/ DELH
		<i>Environmental and Social Codes of Practices (ESCOPs)</i>	SPPL
	-	-	Izin Lingkungan
	Sub Proyek	<i>Land Acquisition Plan (LAP)/ Due Diligence Report (DDR)</i>	

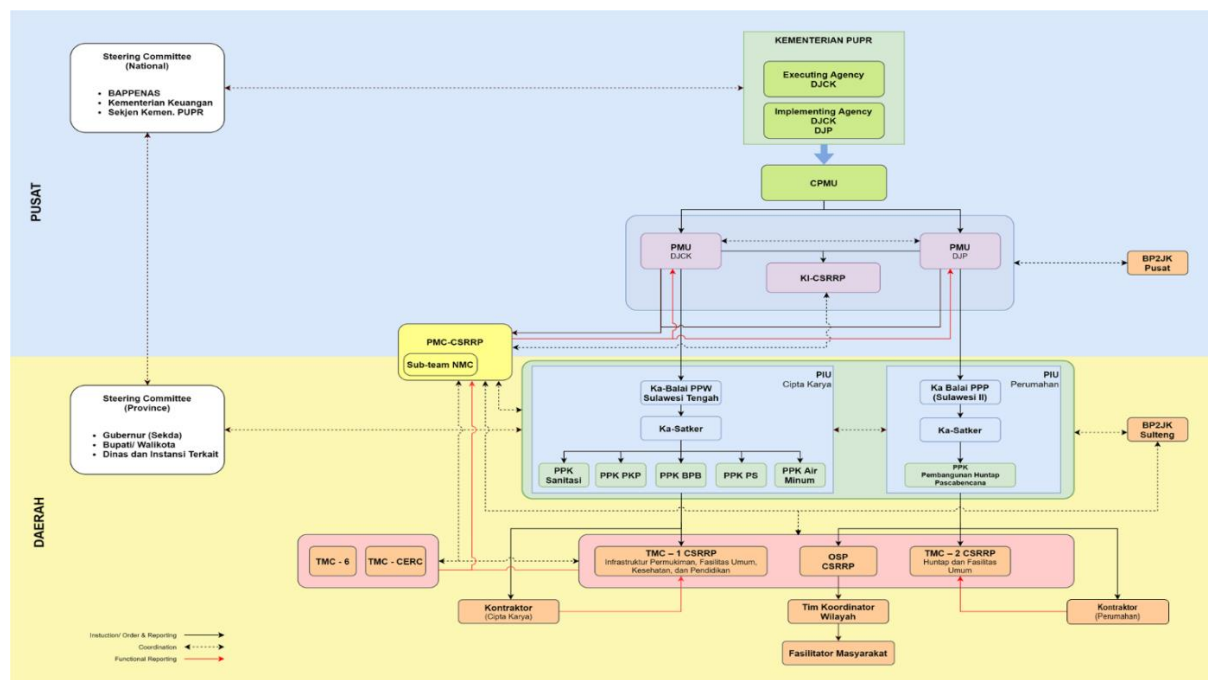
Tahapan Kegiatan	Level Dokumen	Dokumen Yang Harus Disusun Berdasarkan ESMF	Dokumen Yang Harus Disusun Berdasarkan Aturan Indonesia
<i>Resettlement Action Plan (RAP)</i>			
Pengadaan dan Kontrak	Sub Proyek	Dokumen Pemilihan	
		Dokumen Kontrak	
Peninjauan dan Persetujuan	Sub Proyek	<i>Contractor – Environmental and Social management Plan (C-ESMP)</i>	RK3LS/ LSK3 yang terdiri dari RKK, RMLLP, RKPPL, RMPK.
Implementasi dan Pemantauan	Sub Proyek	• Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan KBG/KTA	• Laporan Penerapan RKK
		• List Kepatuhan CESMP	• Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
		<i>Land Acquisition Implementation Report (LAIR)</i>	
		Laporan Pelaksanaan Relokasi (Laporan Progres Penghunian).	

Sumber: ESMF, diolah

### 3.2. Kerangka Institusi/ Struktur Organisasi CSRRP

Penyelenggaraan CSRRP melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait di tingkat pusat hingga daerah.

Berikut ini adalah Kerangka Institusi/ Struktur Organisasi CSRRP.



Sumber: POM CSRRP, hal 81.

## BAB 4

### HASIL AUDIT DAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN

Berdasarkan hasil audit lingkungan dan sosial, dapat disimpulkan bahwa CSRRP telah berjalan **SESUAI** dengan ESMF dan SEP CSRRP yang merupakan wujud dari *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP) yang tertuang dalam *Loan Agreement CSRRP* antara GoI dengan Bank Dunia, LN 8979-ID.

Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi perbaikan untuk masing-masing ruang lingkup berdasarkan hasil ESA:

#### 4.1. Ruang Lingkup 3 - Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan tinjauan dan penilaian terhadap identifikasi pemangku kepentingan sub proyek, serta penilaian kemajuan pelibatan pemangku kepentingan saat ini dan yang direncanakan sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder Engagement Plan* (SEP) CSRRP, dapat disimpulkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan telah **SESUAI** dengan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder Engagement Plan* (SEP) CSRRP.

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
RL.3.1 Strategi pelibatan pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"><li>Hasil penilaian terhadap implementasi strategi pelibatan pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa seluruh stakeholder yang direncanakan akan dilibatkan dalam proyek, telah dilibatkan dan berperan sesuai rencana yang tertuang dalam SEP.</li><li>Di samping itu, terdapat stakeholder yang sebelumnya belum teridentifikasi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek baik pada komponen 1 maupun komponen 2 yaitu Kantor Jasa</li></ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Seluruh rencana pelibatan pemangku kepentingan perlu dijalankan sepenuhnya, ditingkatkan koordinasinya dan perlu dipantau secara berkala</li><li>Dalam setiap tahapan perlu identifikasi semua stakeholder yang perlu dilibatkan untuk mencapai target proyek sesuai dengan timeline.</li></ol>	PMU dengan dukungan konsultan (PMC, TMC-1, TMC-2 dan OSP)



RUANG LINGKUP	KESIMPULAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>Penilai Publik (KJPP), sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan nilai kepada suatu aset sesuai dengan harga pasar dan kondisi yang ada.</p> <p>3. Selain identifikasi pemangku kepentingan, hasil penilaian juga memperlihatkan bahwa secara umum, strategi pelibatan pemangku kepentingan telah dilaksanakan dan seluruh penanggung jawab/PIC telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>4. Terdapat catatan pelaksanaan SEP belum sepenuhnya terlaksana khususnya terkait dengan koordinasi dan pemantauan secara berkala.</p>		
RL 3.2 Rencana Konsultasi Publik	<p>1. Konsultasi publik sudah dilakukan sesuai dengan rencana, baik itu sebelum pinjaman efektif dan saat implementasi proyek.</p> <p>2. Konsultasi publik untuk penyelesaian proyek sebagian sudah dilaksanakan.</p> <p>3. Workshop untuk penyusunan manual dan pedoman teknis lainnya yang diamanatkan dalam TOR konsultan dan POM CSRRP belum sepenuhnya dilaksanakan.</p>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>1. Untuk kegiatan yang masih <i>on going</i>, perlu dipastikan terlaksananya konsultasi publik.</p> <p>2. Workshop untuk penyusunan manual/ pedoman teknis perlu mendapatkan perhatian/ prioritas di proyek serupa di masa yang akan datang.</p>	PMU dengan dukungan konsultan (PMC dan OSP).
RL. 3.3 Penggangan	Hasil penilaian terhadap aspek penganggaran untuk melaksanakan SEP menunjukkan bahwa implementasi dalam aspek penggaran <b>SESUAI</b> dengan rencana yang tertuang dalam SEP.	Penganggaran untuk pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek yang akan datang.	PMU CK dan PMU PP.
RL. 3.4. Pemantauan dan Pelaporan	Hasil penilaian memperlihatkan bahwa sudah ada perencanaan namun implementasi <b>SESUAI SEBAGIAN</b> dengan rencana yang ada dalam dokumen SEP.	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>Di awal proyek, perlu disusun POS mengenai pemantauan dan pelaporan yang memuat elemen</p>	PMU dengan dukungan PMC

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		kunci apa saja yang perlu dipantau dan dilaporkan, jangka waktu, metode dan penanggung jawab kegiatan pemantauan dan pelaporan untuk memastikan rencana yang ada dalam SEP dapat berjalan.	
RL. 3.5 Analisis Pengaruh dan kepentingan	<p>1. Pada komponen 1, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek telah dilibatkan. Peta Stakeholder pada komponen 1 memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTB (<i>Displaced Community dan people in red zones</i>), meskipun dilibatkan dan berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan relokasi, tetapi pengaruhnya justru makin rendah karena tidak sepenuhnya dapat memutuskan kapan akan menghuni huntap. Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah; pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan.</p> <p>2. Pada komponen 2, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek juga telah dilibatkan. Peta stakeholder pada komponen memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTP (penguasa lahan, baik perorangan maupun pemilik konsesi lahan yang berbadan hukum) memiliki pengaruh tinggi ke sedang karena dapat menghambat proses penyediaan lahan dan penghunian (kasus Huntap Talise). Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah; pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan.</p>	Peta hasil analisis pengaruh dan kepentingan stakeholder ini dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek ke depan, stakeholder mana saja yang pengaruhnya besar terhadap proyek dan perlu dilibatkan secara lebih intensif dan hati-hati.	PMU dengan dukungan konsultan (PMC, TMC dan OSP)

#### 4.2. Ruang Lingkup 4 - Hasil Audit Management Lingkungan dan Sosial

Hasil audit memperlihatkan bahwa manajemen lingkungan dan sosial proyek telah **SESUAI** dengan persyaratan ESMF; tahapan manajemen lingkungan dan sosial telah dilaksanakan, sebagian besar dokumen tersedia dan sesuai dengan persyaratan ESMF.

Hasil review terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial memperlihatkan bahwa pelaksana proyek dengan dukungan konsultan telah berusaha menyiapkan seluruh dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan oleh regulasi Indonesia (DELH, UKL-UPL, SPPL) serta dokumen yang dipersyaratkan oleh ESMF (ESMP dan ESCOP); tetapi karena tidak ada format harmonisasi dokumen, maka penyusunan dua kelompok dokumen rencana pengelolaan lingkungan itu sulit diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga terjadi pada kontraktor. Kontraktor memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RK3LS/ LSK3 sesuai regulasi Indonesia serta CESMP sebagaimana dipersyaratkan oleh ESMF. Karena tidak ada format harmonisasi dokumen maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan dokumen.

Saat implementasi, pemantauan dan pelaporan, selain masalah keterlambatan penyusunan dokumen, pada beberapa subproyek, laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosialnya tidak lengkap. Pada tahap ini, muncul format laporan Kepatuhan CESMP yang tidak memiliki pijakan, baik dalam aturan pemerintah Indonesia maupun ESMF. Demikian pula poin-poin yang diperiksa dalam laporan kepatuhan itu tidak selalu sejalan dengan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun, baik oleh pelaksana proyek maupun kontraktor.

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
Tahap 1. Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan Sub proyek	<b>SESUAI.</b> CPMU dan PMU telah melakukan penilaian kelayakan sub proyek . CPMU dan PMU telah menggunakan daftar negatif untuk memastikan bahwa kegiatan/ sub proyek yang didanai tidak termasuk dalam daftar negatif.	Pelaksanaan kegiatan di tahap ini dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.	CPMU dan PMU
Tahap 2. Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen	<b>SESUAI</b> PMU dengan dukungan PMC telah melaksanakan penyaringan risiko sub proyek. DLH telah melakukan penyaringan teknis dampak lingkungan dan sosial serta memberikan rekomendasi	Pelaksanaan kegiatan di tahap ini dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.	PMU dengan dukungan PMC serta DLH Kota/ Kabupaten

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	dokumen lingkungan yang perlu disusun oleh pemrakarsa (BPPW/BP2P).		
Tahap 3. Penyiapan Instrumen	<b>SESUAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh instrumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (DELH, UKL/UPL, SPPL, ESMP dan ESCOP serta LAP/DDR dan RAP) telah disusun, tetapi dari sisi waktu tidak sesuai dengan tahapan yang dipersyaratkan oleh ESMF CSRRP.</li> <li>Dari sisi isi dokumen, terdapat variasi dan tumpang tindih isi dokumen antara UKL-UPL dengan ESMP dan SPPL dengan ESCOP yang disebabkan tidak tersedianya manual yang lebih teknis.</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Di awal proyek perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang merupakan harmonisasi dari dokumen lingkungan yang memenuhi persyaratan ESMF dengan dokumen lingkungan yang sesuai dengan persyaratan aturan Indonesia.</li> </ol>	PIU (BPPW/BP2P) dengan dukungan PMC dan OSP
Tahap 4. Pengadaan dan kontrak	<b>SESUAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>BP2JK dengan dukungan <i>Procurement Specialist</i> telah menyusun dokumen pemilihan untuk seluruh sub proyek.</li> <li>Adanya 2 macam dokumen lingkungan (yaitu UKL-UPL dan ESMP, serta SPPL dan ESCOP) yang disusun oleh pemrakarsa (BPPW/BP2P dengan dukungan dari PMC) berdampak pada adanya variasi dokumen pemilihan dalam lampiran Matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial yang menjadi kewajiban kontraktor terpilih. Matriks yang tercantum pada dokumen pemilihan RR Universitas Tadulako mengacu pada ESMP, sedangkan yang lain mengacu pada Dokumen UKL-UPL.</li> <li>Dokumen pemilihan untuk Huntap Bangga Dusun 2 mencantumkan persyaratan ESMF secara umum tetapi</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>Di awal proyek, perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial.</p>	BP2JK dengan dukungan <i>Procurement Specialist</i> dan PPK

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	tidak mencantumkan matriks rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. 4. Semua kontrak, secara umum mengamanatkan kepada kontraktor untuk mengikuti persyaratan ESMF.		
Tahap 5. Peninjauan dan persetujuan	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> 1. Semua kontraktor telah menyusun LSK3 dan CESMP. 2. Apabila melihat dari tanggal pemeriksaan oleh TMC dan pengesahan oleh PPK, dapat disimpulkan bahwa dari 7 sub proyek, dapat dipastikan bahwa 5 diantaranya yaitu CESMP untuk RR Tadulako, IPA Poboya, Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani-1 dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio, selesai disusun setelah pekerjaan konstruksi dimulai.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: 1. Di awal proyek, perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang menjadi acuan bersama antara pemrakarsa (BPPW/BP2P) dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor).	PMU dengan dukungan TMC-1 dan TMC-2
Tahap 6. Implementasi dan pemantauan	<b>SESUAI</b> 1. Pelaksanaan pengadaan tanah sudah sesuai dengan persyaratan ESMF dalam hal ruang lingkup substansinya. Ada LAP yang terbit pasca pelaksanaan pengadaan tanah. Laporan pelaksanaan pengadaan tanah tersedia tetapi belum lengkap. 2. Sebagian besar pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial sudah sesuai dengan ESMF. - Laporan Pelaksanaan RKL-RPL tersedia tetapi belum lengkap. - Laporan Bulanan Penerapan RKK tersedia tetapi belum lengkap. 3. Kegiatan Pencegahan KBG/KTA telah dilaksanakan di 7 subproyek. - Laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG dan KTA tersedia dan lengkap.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: 1. Di awal proyek, perlu dibuat POS untuk penyusunan LAP dan laporan pelaksanaannya. 2. Kontraktor perlu difasilitasi untuk lebih mematuhi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam LSK3 dan CESMP. Perlu disusun POS penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sinkron dengan instrumen pengendalian CESMP. 3. Pengelolaan risiko KBG/KTA di CSRRP dapat menjadi pembelajaran yang baik dalam proyek-proyek serupa yang akan datang. 4. Pelaksanaan relokasi dan pendampingan WTB di CSRRP dapat menjadi pembelajaran yang	PMC, Kontraktor, TMC1 dan TMC2

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	4. Pelaksanaan relokasi dan pendampingan WTB telah dilaksanakan dan sesuai dengan persyaratan ESMF.	baik bagi proyek-proyek serupa yang akan datang.	

#### 4.3. Ruang Lingkup 5 dan 6 - Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana, Konsultan dan Kontraktor

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	REKOMENDASI	PIC
RL 5. Kapasitas dan sumber daya Lembaga pelaksana	Secara umum, kapasitas lembaga pelaksana CSRRP di tingkat pusat dan daerah dalam management lingkungan dan sosial telah <b>MEMADAI</b> baik dalam pemantauan dan evaluasi tingkat proyek maupun sub proyek, juga dalam pengawasan terhadap konsultan dan kontraktor. Khusus untuk Pemda, kapasitasnya <b>CUKUP MEMADAI</b> . Hal itu terjadi terutama karena kurangnya jumlah personel dan anggaran pada dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menyebabkan keterlambatan dalam mengeluarkan dokumen-dokumen penapisan dan izin lingkungan, serta keterbatasan dalam pemantauan manajemen lingkungan dan sosial.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: Perlu diskresi aturan terkait kebutuhan anggaran untuk dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial.	CPMU, PMU, Pemda
RL 6. Kapasitas konsultan dan kontraktor	Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas konsultan, kontraktor dan konsultan pengawas dalam manajemen lingkungan dan sosial <b>MEMADAI</b> meskipun beberapa output terlambat dari waktu yang telah ditetapkan.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: 1. Untuk meningkatkan kinerja proyek (dari sisi ketepatan waktu) perlu meningkatkan koordinasi antar konsultan.	PMU dengan dukungan konsultan (PMC, TMC dan OSP)

#### 4.4. Ruang Lingkup 7 - Menilai Pengelolaan Risiko Terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Hasil penilaian terhadap rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait aliran tenaga kerja, K3, lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko **SESUAI/ MEMATUHI** ESMF.

Risiko terkait *labor influx*/ aliran tenaga kerja: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait *labor influx*/ aliran tenaga kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC 2 telah **SESUAI/ MEMATUHI** ESMF.

Risiko terkait K3: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC 2 telah **SESUAI/ MEMATUHI** ESMF.

Risiko terkait Lingkungan: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko lingkungan yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC 2 telah **SESUAI SEBAGIAN/ MEMATUHI SEBAGIAN** ESMF.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC 2 telah **SESUAI/ MEMATUHI** ESMF.

##### A. Ruang Lingkup 7.1 - *Labor Influx*/ Aliran Tenaga Kerja

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
<i>Labor Influx</i> / aliran tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha</li> <li>2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat</li> <li>3. Kesehatan dan kelayakan barak/ basecamp pekerja</li> <li>4. Kontak Fisik/ tertular COVID-19</li> <li>5. Risiko KBG/KTA</li> <li>6. Pelepasan Tenaga Kerja konstruksi</li> </ol>	<p><b>SESUAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua kontraktor di seluruh sub proyek telah memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.</li> <li>2. Pekerja diberikan upah sesuai UMK/UMP atau sesuai dengan perijinan kerja, tetapi terjadi kasus gaji yang terlambat dibayarkan. Kontraktor lokal telah dilibatkan sebagai kontraktor rekanan/ pemasok material.</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian kesempatan kerja kepada pekerja lokal, kerjasama dengan kontraktor lokal dan pencegahan KBG/KTA di CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.</li> <li>2. Kontraktor perlu didorong untuk lebih mematuhi aturan</li> </ol>	PPK dengan dukungan TMC serta Disnaker.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		3. Barak pekerja/ base camp belum memenuhi standard kelayakan, terutama dari sisi lokasi maupun ukuran dan fasilitas. 4. Kontraktor telah melakukan pencegahan penyebaran COVID 19. 5. Pencegahan KBG/KTA dilakukan dengan pelatihan pencegahan KBG/KTA kepada pekerja dan masyarakat. 6. Dalam hal pelepasan tenaga kerja konstruksi belum ada upaya untuk membina warga/ pekerja pasca berakhirnya masa kerja.	mengenai upah, jaminan sosial dan kesehatan serta barak pekerja.	

#### B. Ruang Lingkup 7.2 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1. Potensi Terjadinya Kecelakaan Kerja	<b>SESUAI</b> 1. Semua kontraktor di 7 subproyek telah menyusun struktur pengelola K3 2. Melakukan pelatihan terkait ketenagakerjaan dan lingkungan kerja 3. Menyediakan APD 4. Menyusun prosedur penggunaan peralatan. 5. Membangun mekanisme penanganan insiden 6. Peralatan dan obat-obatan P3K belum tersedia di semua lokasi sub proyek. Di Huntap Talise dan Huntap Tompe 1,2,3, tidak tersedia kotak P3K.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: 1. Adanya struktur pengelola K3, pelatihan terkait K3, prosedur penggunaan peralatan dan mekanisme penanganan insiden dapat menjadi pembelajaran dalam proyek-proyek berikutnya. 2. Perlu pengawasan yang lebih ketat mengenai penggunaan APD pada pekerja baik oleh kontraktor maupun konsultan	PPK, TMC, Kontraktor dan Disnaker.



ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		7. Hasil observasi memperlihatkan bahwa cukup banyak pekerja yang bekerja tanpa menggunakan APD yang memadai.	pengawas, termasuk memberikan teguran kepada kontraktor. 3. Pelatihan kepada pekerja perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa K3 merupakan kebutuhan pekerja.	

### C. RL 7.3 - Lingkungan

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Udara ambien</li> <li>2. Kebisingan</li> <li>3. Sanitasi Lingkungan dan Timbulan Limbah Padat kegiatan domestik, limbah konstruksi dan atau bongkaran puing/ debris.</li> <li>4. Timbulan limbah cair</li> <li>5. Risiko pencemaran dan gangguan kesehatan akibat timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun/ B3 (minyak/ oli bekas, cat, bahan kimia, asbestos)</li> <li>6. Kuantitas air</li> <li>7. Kualitas air</li> <li>8. Sedimentasi dan erosi</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas udara ambien di semua sub proyek yang dalam tahap pembangunan konstruksi tidak melampaui baku mutu.</li> <li>2. Tingkat kebisingan di lokasi sub proyek RR Universitas Tadulako dan Huntap Talise pada siang hari melampaui baku mutu.</li> <li>3. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh TMC-1 dan TMC – 2 di lokasi sub proyek, timbulan sampah belum melampaui volume daya tampung dari pewadahan yang disediakan.</li> <li>4. Timbulan limbah cair di lokasi sub proyek telah dikelola sehingga tidak terjadi genangan.</li> <li>5. Limbah B3 yaitu asbestos di lokasi RR Tadulako telah dikelola tapi laporan belum</li> </ol>	<p>Beberapa jenis risiko lingkungan dalam audit ini tidak dikelola karena tidak ada dalam LSK3 maupun CESMP. Terkait dengan hal itu, maka direkomendasikan hal-hal berikut:</p> <p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh risiko lingkungan yang sudah diidentifikasi dan direncanakan pengelolaannya baik dalam UKL-UPL, ESMP, SPPL dan ESCOP perlu dibuat rencananya dalam dokumen lingkungan yang disusun oleh kontraktor (harmonisasi LSK3</li> </ol>	PPK, TMC, Kontraktor dan DLH.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	9. Getaran 10. Gangguan Vegetasi 11. Air Limpasan/ Air Larian	<p>disampaikan ke DLH dan WB. Di lokasi pembangunan infrastruktur huntap Lompio tidak ada laporan mengenai pengelolaan limbah B3, demikian juga di lokasi sub proyek Huntap Tompe 1,2,3 tidak ada rencana pengelolaan dan tidak ada laporan mengenai pengelolaan limbah B3.</p> <p>6. Dari hasil pemantauan, penggunaan air bersih oleh tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang wajar.</p> <p>7. Hasil uji laboratorium kualitas air bersih memperlihatkan bahwa di beberapa lokasi, parameter biologi yang terdiri dari e-coli dan total coliform melebihi baku mutu kualitas air bersih untuk keperluan <i>higiene</i> dan sanitasi.</p> <p>8. Di beberapa lokasi sub proyek, pekerja tidak mengetahui mekanisme dan prosedur pengendalian erosi dan sedimentasi. Tidak ada pelatihan kepada pekerja mengenai pengendalian erosi dan sedimentasi.</p> <p>9. Pengelolaan risiko lingkungan berupa getaran telah direncanakan dalam dokumen CESMP Universitas Tadulako tetapi tidak ada laporan implementasi baik oleh kontraktor maupun TMC-1.</p> <p>10. Pengelolaan risiko gangguan vegetasi telah dilaksanakan di lokasi sub proyek IPA</p>	<p>dan CESMP) dan dibuat laporannya.</p> <p>2. Konsultan pengawas perlu lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dibuat laporannya.</p>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<p>Poboya tetapi tidak dilaksanakan di tempat lain. Di Universitas Tadulako, pemeliharaan vegetasi merupakan bagian dari upaya pengelolaan penurunan kuantitas air tanah dan pengelolaan dampak peningkatan air larian.</p> <p>11. Pengelolaan dampak air larian telah dilaksanakan di lokasi-lokasi sub proyek.</p>		

#### D. RL 7.4 - Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN PERBAIKAN	PIC
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi dan Sikap Masyarakat</li> <li>2. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas akibat mobilisasi, demobilisasi alat dan material</li> <li>3. Kerusakan badan jalan</li> <li>4. Prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas (khususnya ISPA) pada pekerja operator alat berat dan konstruksi maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalur yang digunakan untuk mobilisasi dan</li> </ol>	<p><b>SESUAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan risiko terkait persepsi dan sikap masyarakat telah dilakukan di 7 subproyek dengan melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan proyek.</li> <li>2. Di seluruh lokasi sub proyek, pengelolaan risiko gangguan kelancaran lalu lintas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja manajemen lalu lintas.</li> <li>3. Upaya pengelolaan risiko kerusakan badan jalan dilakukan dengan membatasi beban kendaraan dan jam operasional kendaraan yang mengangkut material.</li> <li>4. Pengelolaan risiko prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat di sub proyek CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek berikutnya khususnya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</li> <li>2. Pengelolaan risiko kebakaran perlu dimasukkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial dan diimplementasikan serta dibuat laporannya.</li> </ol>	PPK, TMC, Kontraktor dan Disnaker, Dinas Perhubungan.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>demobilisasi alat dan material.</p> <p>5. <i>Waterborne deasese</i> akibat pencemaran air tanah dari aktifitas sanitasi (air limbah) di base camp.</p> <p>6. Risiko Kebakaran</p>	<p>pada pekerja operator alat berat dan konstruksi maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalur yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi alat dan material telah dilakukan di seluruh sub proyek yang diaudit.</p> <p>5. Rencana pengelolaan risiko <i>Waterborne deasese</i> akibat pencemaran air tanah dari aktifitas sanitasi (air limbah) di base camp dilaksanakan dengan pengelolaan sanitasi basecamp.</p> <p>6. Pengelolaan risiko terkait risiko kebakaran hanya dilakukan di beberapa sub proyek. Ada lokasi sub proyek yang tidak dilengkapi dengan APAR.</p>		

#### 4.5. Ruang Lingkup 8 - Pengadaan Lahan dan Relokasi

Hasil penilaian terhadap proses pengadaan lahan dan relokasi WTB menunjukkan bahwa pengelolaan risiko terkait pengadaan lahan dan relokasi WTB telah dilaksanakan SESUAI dengan persyaratan ESMF.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
Penyediaan Lahan	<p>1. Terbatasnya lahan yang tersedia</p> <p>2. Kejelasan dan kepastian status hukum lahan.</p> <p>3. Penolakan dari pemilik/pengguna lahan untuk melepaskan lahan;</p>	<p><b>SESUAI</b></p> <p>1. Penyediaan lahan dilakukan di 6 subproyek. Untuk RR Universitas Tadulako tidak membutuhkan penyediaan tanah karena dilaksanakan di lokasi eksisting. Penyediaan lahan di 6 sub proyek dilakukan dengan tukar menukar tanah, pemanfaatan tanah eks HGB, jual beli, ijin</p>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum, proses penyediaan lahan di 7 sub proyek CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi</li> </ul>	Pemda dan Kanwil ATR-BPN dengan dukungan tim Konsultan.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>kurangnya konsultasi yang bermakna selama proses pembebasan lahan.</p> <p>4. Pengalihan hak dan kepemilikan lahan. Data yang tidak akurat mengenai hak atas lahan dan pengalihan kepemilikan; tidak melibatkan perempuan pada proses tersebut.</p>	<p>penggunaan lahan yang dilewati dan penyediaan tanah secara mandiri berkelompok.</p> <p>2. Untuk memastikan status hukum lahan maka penyediaan lahan di 6 sub proyek dilaksanakan melalui tahapan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sub proyek</li> <li>• Penetapan lokasi pembangunan</li> <li>• Penetapan status lahan oleh Kanwil ATR-BPN Sulawesi Tengah atau kantor ATR-BPN Kota/ Kabupaten.</li> <li>• Penilaian kerugian oleh KJPP (apabila tanah berada dibawah penguasaan WTP/ pemilik konsesi lahan)</li> <li>• Penyepakatan pembelian/ tukar menukar</li> <li>• Pelepasan hak atas tanah</li> </ul> <p>3. Untuk menghindari penolakan dari pemilik/pengguna lahan maka dilakukan konsultasi publik dan sosialisasi oleh Pemda (termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan), dengan dukungan BPPW/BP2P dan konsultan.</p> <p>4. Dalam kegiatan sosialisasi itu, perempuan (WTP) juga dilibatkan.</p> <p>5. Di lokasi Huntap Talise ada klaim dari penggarap lahan. Pengelolaan risiko dengan adanya klaim atas aset dilakukan dengan cara <i>due diligent</i> oleh Proyek dan oleh Pemda dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai</p>	<p>proyek-proyek serupa yang akan datang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ketelitian dalam memeriksa bukti lahan.</li> <li>• Untuk infrastruktur yang vital yang membutuhkan lahan, seperti jaringan air minum/ air bersih, dibuka ketentuan pembebasan/ pengadaan lahan.</li> </ul>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Di Huntap Tompe 2 terdapat klaim lahan di salah satu persil. Penanganan risiko dan potensi dampak dilakukan melalui jalur hukum dan kesepakatan antara Pemda Kabupaten Donggala dan CSRRP untuk menggunakan lahan yang semula direncanakan sebagai RTH untuk menggantikan persil yang dalam sedang dalam sengketa. Di lahan yang dilewati jaringan IPA Poboya terdapat ketidakjelasan status penguasaan lahan. Pengelolaan risiko dan dampaknya dilakukan oleh proyek melalui dialog dengan para pemangku kepentingan (WTP).		
Relokasi WTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Validitas Data WTB</li> <li>Munculnya konflik antar penghuni huntap maupun dengan <i>host community</i>.</li> <li>Kurang partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses relokasi</li> <li>Terganggunya penghidupan WTB pasca menghuni huntap (ekonomi, sosial, hukum).</li> </ol>	<p><b>SESUAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk memastikan validitas data WTB, maka pendataan WTB dilakukan dengan tahapan sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB) calon penghuni Huntap.</li> <li>Proses identifikasi warga terdampak bencana dilakukan berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, Pemerintah Desa dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</li> <li>Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada WTB terkait SK Gubernur Sulteng Nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana</li> </ul> </li> </ol>	Rencana dan implementasi relokasi WTB di CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.	Pemda, PMU, OSP.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<p>Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengumpulan berkas WTB</li> <li>- Melakukan validasi data WTB dan penerbitan SK WTB oleh Pemda.</li> </ul> <p>2. Salah satu pengelolaan risiko dan dampak dari relokasi untuk menghindari adanya konflik antar penghuni huntap, proyek melakukan tahapan penghunian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan sosialisasi dan rembug warga.</li> <li>b. Pemilihan Blok dan Persil Huntap</li> <li>c. Cek fisik partisipatif</li> <li>d. Penyusunan rencana pemindahan.</li> <li>e. Pemindahan WTB</li> <li>f. Penerbitan sertifikat bagi WTB</li> </ul> <p>3. Pengelolaan risiko untuk mencegah munculnya konflik antar penghuni huntap dan konflik dengan <i>host community</i> dilakukan dengan kajian masyarakat setempat untuk memastikan WTB yang masuk ke huntap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya di sekitar huntap. Di Huntap Wani 1, salah satu bentuk pengelolaan risiko untuk mencegah kecemburuan warga sekitar (<i>host community</i>) maka proyek menyediakan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan (ISL) berupa jalan lingkungan, drainase dan MCK.</p>		

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<p>4. Untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan maka perempuan dan kelompok rentan selalu dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan. Dalam pemilihan persil, kelompok rentan mendapat prioritas untuk memilih persil terlebih dahulu.</p> <p>5. Untuk memastikan keberlangsungan penghidupan calon penghuni huntap maka sebelum relokasi, dilakukan kajian Sosial dan Ekonomi terhadap WTB Calon Penghuni Huntap yang dilanjutkan dengan rembuk untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi WTB. WTB juga difasilitasi untuk membentuk pokmas untuk pengelolaan infrastruktur yang ada di huntap.</p> <p>6. Untuk menjamin kejelasan dan kepastian status lahan bagi penerima manfaat (WTB) maka pengelolaan risiko dan potensi dampak dilakukan oleh proyek adalah membuat kesepakatan dengan Pemda untuk menerbitkan surat pernyataan kesanggupan Pemda untuk memfasilitasi proses penerbitan sertifikat tanah, PBG, SLF untuk masing-masing WTB.</p>		

#### 4.6. Ruang Lingkup 9 - Menilai Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan

Hasil penilaian terhadap aksesibilitas, kredibilitas, efektivitas mekanisme umpan balik dan penyelesaian laporan menunjukkan bahwa pengelolaan mekanisme umpan balik dan penyelesaian keluhan CSRRP telah SESUAI dengan ESMF.



NO.	ASPEK FGRM	PARAMETER	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
1	Aksesibilitas	1. Tersedia mekanisme penanganan pengaduan	<b>SESUAI</b> Proyek CSRRP telah menyediakan mekanisme penanganan pengaduan. Koordinasi antar pelaksana belum berjalan optimal.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: Perlu peningkatan koordinasi antar pelaksana.	PMU dengan dukungan PMC, TMC-1, TMC-2 dan OSP.
		2. Setiap orang (masyarakat, pekerja, WTB) dapat mengakses saluran pengaduan yang disediakan	<b>SESUAI</b> Berbagai saluran pengaduan (hotline, pengaduan langsung, wa grup, website Pemda) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat dan telah disosialisasikan.	-	
2	Kredibilitas	1. Tersedia Lembaga/personel yang mengelola PPM	<b>SESUAI</b> Telah tersedia Lembaga/personel yang mengelola PPM	-	
		2. Tersedia laporan berkala	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Telah tersedia laporan yang dipublikasikan di website SITABA tetapi belum lengkap. Tidak tersedia data antara lain Desember 2021, September 2021. Untuk bulan September 2023 dan Oktober 2023 masing-masing hanya ada 1 dan 2 pengaduan.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: Laporan Pengaduan perlu disampaikan secara berkala dengan informasi yang lengkap	PMU dengan dukungan PMC
3	Efektivitas	90% pengaduan terselesaikan	<b>SESUAI</b>		